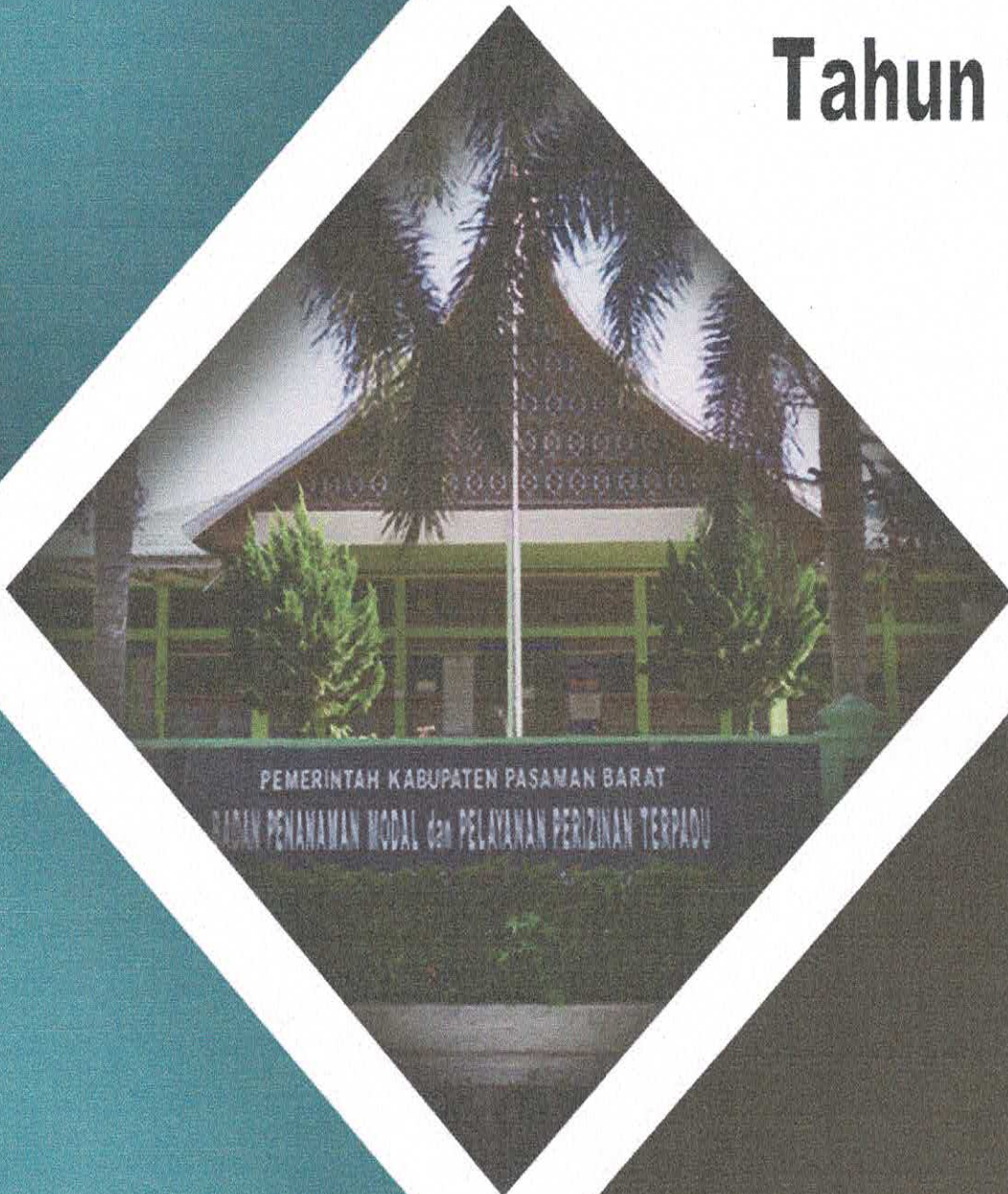




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

Tahun 2022



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2023**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4.745.365.355 101.625.000 65.731.000 35.894.000 3.754.539.735 3.601.955.535 49.350.000 103.234.200	4.606.051.996 97,06 96.444.230 94,90 62.276.430 94,74 34.167.800 95,19 3.659.746.910 97,48 3.507.222.710 97,37 49.350.000 100,00 103.174.200 99,94	Untuk Kegiatan ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah teralaisasi seluruhnya.		

3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.850.000	24.850.000	Untuk Kegiatan ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah dapat digunakan 100%	
4. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	24.850.000	100,00		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.600.500	68.072.400	Untuk Kegiatan ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah dapat digunakan hampir 100%	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.449.500	96,42 54.351.900		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.151.000	96,28 13.720.500		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.149.750	96,96 260.785.777	Untuk Kegiatan ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah teralisasi seluruhnya.	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3.400.000	95,47 3.400.000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.911.000	100,00 22.799.000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.821.500	87,99 13.121.500		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.015.250	94,94 16.015.250		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.002.000	100,00 205.450.027		
			96,00		

				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.235.000	85.542.452			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.644.000	123.480.000	92,74		
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	64.113.500	61.971.000	99,87		
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	64.113.500	61.971.000	96,66	Untuk Kegiatan ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah dapat digunakan hampir 100%	
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	64.113.500	61.971.000	96,66		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	44.192.500	44.190.000	99,99		
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44.192.500	44.190.000	99,99	Untuk Kegiatan ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah dapat digunakan hampir 100%	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	44.192.500	44.190.000	99,99		
2				Peraturan BKPM RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tatacara Promosi Penanaman Modal 2. Peraturan Bupati Pasaman barat nomor 46 tahun 2021 tentang RUPM daerah 2020-2032					

3	Permendagri No 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	143.635.000	142.592.574	142.592.574	99,27	Untuk Kegiatan Ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah dapat digunakan hampir 100%		
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	143.635.000	142.592.574	142.592.574	99,27			
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	110.801.000	110.382.355	110.382.355	99,27			
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan.	32.834.000	32.210.219	32.210.219	99,62			
						98,10			
4	1. Peraturan BKPM RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	403.438.000	369.968.300	369.968.300	91,70	Untuk Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi fisiknya sudah 100% dan realisasi keuangannya 86,18% karena bersisnya anggaran sewa kendaraan dan anggaran belanja BBM. hal tersebut dikarenakan anggaran untuk perjalanan dinas sudah habis. dan ada belanja makan minum rapat pertemuan yang masih bersisa karena pembayarannya dialihkan pada anggaran penyelesaian masalah sebab melibatkan tim teknis terkait usaha yang tidak memiliki izin	Sudah dibentunya Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan atau izin yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam bentuk SK Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan.	
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	403.438.000	369.968.300	369.968.300	91,70			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.044.000	9.853.400	9.853.400	98,10			

					316.522.000	293.868.200			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			92,84		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		76.872.000	66.246.700		
							86,18		
5			Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.150.000	11.744.000			
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.150.000	11.744.000	96,66	Untuk Kegiatan Ini tidak ada permasalahan yang signifikan, karena anggaran sudah dapat digunakan hampir 100%	
				Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12.150.000	11.744.000	96,66		

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pasaman Barat	Peraturan Bupati Pasaman barat nomor 46 tahun 2021 tentang RUPM daerah 2020-2032	a. Menyediakan dokumen dasar perencanaan untuk membuat kebijakan dibidang penanaman modal untuk para calon investor atau penanam modal b. Mengembangkan manajemen penanaman modal dalam arti luas c. Menanggulangi dampak isi - isu kebijakan dan strategi perencanaan pengembangan penanaman modal d. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan bidang investasi atau penanaman modal secara kompreensif hingga tahun 2032 e. Memerikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal, khususnya antara RUPMK dengan RUPMP serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

No	Rekomendasi RPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1	Kami Rekomendasikan Dalam rangka penertiban izin – izin yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu terhadap Perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan maksimal dengan memanfaatkan Tim yang telah dibentuk untuk dapat memonitoring dan mengevaluasi izin – izin tersebut.	Sudah dibentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan atau izin yang telah diterbitkan yang dituangkan dalam bentuk SK Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan.	Setelah dibentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan maka dilakukan pengawasan terhadap semua izin yang telah diterbitkan dengan Tim kelapangan.

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala DPMP/SP



FADUL SABI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19700814-199703 1 005